

TESIS

**KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA TERORISME DI INDONESIA**



OLEH :

**IDA BAGUS PUTU SUARTANA
NIM 20092025035**

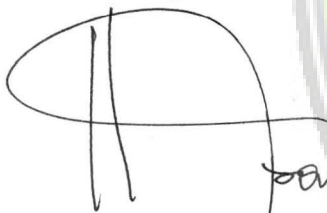
**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
JAKARTA
2011**

KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA

OLEH :
IDA BAGUS PUTU SUARTANA
NIM 20092025035

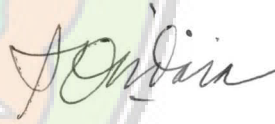
**USULAN PENELITIAN TESIS INI TELAH
DISETUIJUI PADA TANGGAL, 28 JUNI 2011**

Pembimbing I



Prof. Koesparmono Irsan, SIK., SH., MBA., MM

Pembimbing II



K.G. Widjaja, SH., MH

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



Prof. I Made Widnyana, SH

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



Dr. Anton Wachidin Widjaja, MM

Tesis ini telah Diuji Pada
Tanggal : 28 Juni 2011

Panitia Penguji Tesis
Berdasarkan SK Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Nomor : SKEP/001/VI/2011/PPs-MH/UBJ

Ketua : Prof. Koesparmono Irsan, SIK, SH., MBA., MM

Anggota : 1. Dr. R.M. Panggabean, SH., MH

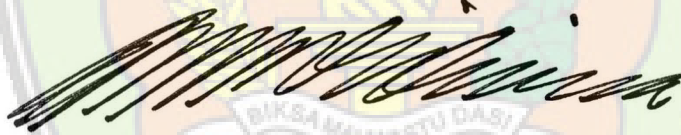
2. Prof. I Made Widnyana, SH

3. K.G. Widjaja, SH., MH

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

NAMA : IDA BAGUS PUTU SUARTANA
NPM : 20092025035
FAK/PROG STUDI : MAGISTER ILMU HUKUM
JUDUL TESIS : KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
TERORISME DI INDONESIA.

DISETUJUI OLEH
KETUA PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM



Prof. I MADE WIDNYANA.,SH

Pembimbing Materi



(Prof.Drs.Koesparmono Irsan,SH,MM,MBA)

Pembimbing Teknis



(KG Widjaya,SH,MH)

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Tesis dengan judul:

KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA, yang dibuat untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, adalah dibuat oleh saya sendiri dan bukan merupakan tiruan (plagiat) dari Tesis lain yang pernah dipergunakan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi. Saya telah membuat rujukan-rujukan sesuai kebiasaan akademik apabila saya mengutip bahan orang lain.

Saya menyadari bahwa apabila terbukti Tesis saya ini plagiat (menerbitkan karya tulis orang lain atas nama sendiri), maka gelar Magister Ilmu Hukum saya dapat dicabut.

Jakarta, Juni 2011



(IDA BAGUS PUTU SUARTANA,SH/20092025035)

MOTTO

Syukurilah apa yang engkau miliki
Karena itu merupakan anugrah-Nya
Hidup penuh tantangan
Hadapilah



Untuk

Keluarga, Istri tercinta, Orang tua, Saudara-saudariku yang ada di Jakarta
maupun yang ada di Bali

KATA PENGANTAR

Atas Puji Syukur dan karunia-Nya Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa), sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini sebagai tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Ilmu Hukum.

Dan dalam kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Logan Siagian, MH, sebagai Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, kepada Bapak Dr. Anton Wachidin, MM, selaku Direktur Program Pascasarja Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dan kepada Bapak Prof I Made Widnyana, SH, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus khusus kepada semua pihak yang telah membantu dalam rangka penulisan tesis ini, lebih khusus juga disampaikan kepada kedua pembimbing yaitu Bapak Prof. Koesparmono Irsan, SH.MM., MBA, dan Bapak KG Widjaya, SH., MH, ucapan hormat dan terima kasih penulis sampaikan, yang telah memberikan perhatian, bimbingan dan pengarahannya kepada penulis sampai dengan selesainya tesis ini. Dan juga kepada Staf Administrasi Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah membantu penulis dalam urusan administrasi.

Khusus untuk keluarga tercinta, istri, yang telah mensport penulis dalam mengikuti studi, maupun dalam penulisan tesis ini. Serta rekan-rekan angkatan II di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dan semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, hingga tesis ini selesai.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih terdapat banyak kekurangan. Karena itu, penulis akan menerima dengan senang hati kritik serta saran para pembaca.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Depok, Juni 2011

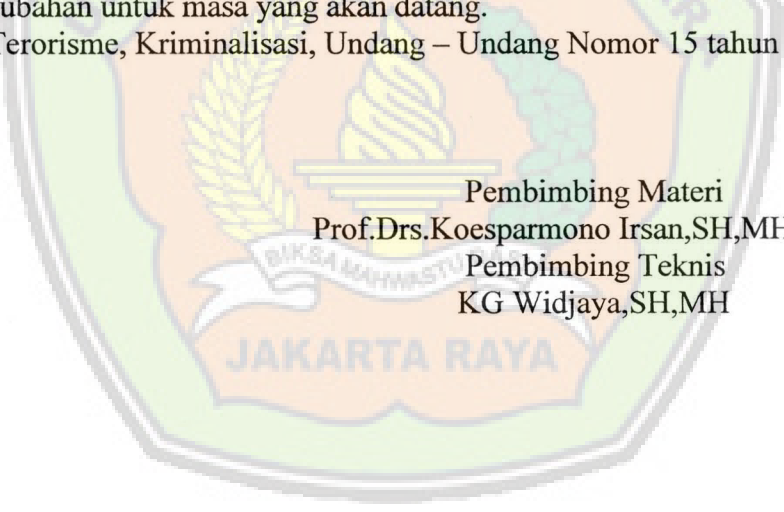
Penulis

ABSTRAK

Ida Bagus Putu Suartana, 20092025035, Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia, (xiv), (207;2011).

Terorisme merupakan tindak pidana yang sangat menakutkan bagi warga masyarakat dunia maupun masyarakat Indonesia. Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 wajib melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu Negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya dari setiap ancaman terorisme baik yang bersifat nasional maupun internasional. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 merupakan kebijakan Legislatif dalam upaya menanggulangi tindak pidana terorisme di Indonesia dan juga melawan terorisme internasional yang kemungkinan terjadi di Indonesia. Penelitian yang digunakan dalam tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hukum pidana sebagai sarana penanggulangan tindak pidana terorisme sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, antara lain dengan melakukan kriminalisasi. Kebijakan kriminalisasi tersebut diformulasikan dalam kelompok Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana yang berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme. Dalam penerapannya ternyata Undang-Undang tersebut masih mengalami hambatan dan kekurangan-kekurangan sehingga perlu dilakukan perubahan-perubahan untuk masa yang akan datang.

Kata Kunci : Terorisme, Kriminalisasi, Undang – Undang Nomor 15 tahun 2003



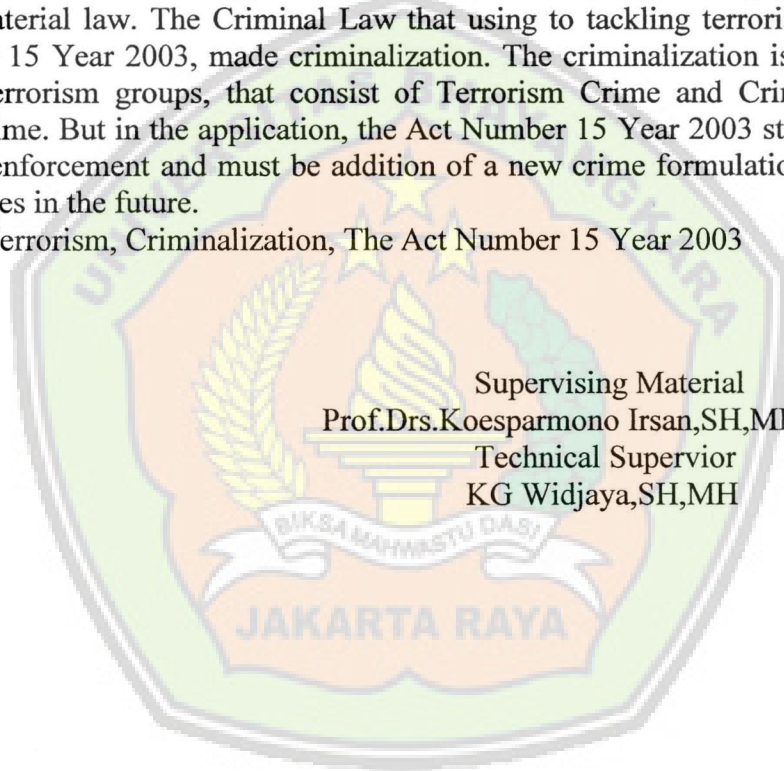
Pembimbing Materi
Prof.Drs.Koesparmono Irsan,SH,MH,MBA
Pembimbing Teknis
KG Widjaya,SH,MH

ABSTRACT

Ida Bagus Putu Suartana,200092025035,Policy criminal in tackling the crime of terrorism according to national,(xiv),(207;2011).

Terrorism is one of the most crimes that make International society or Indonesian society very fear. The Indonesian government which it letter in the Undang-Undang Dasar 1945 must be protected the whole nation of Indonesia citizen and entire citizen of Indonesia. Therefore state is obliged to protect Indonesia citizen from every crime treat of terrorism, that have characteristic of national terrorism or international terrorism. The Act Number 15 Year 2003 is the Legislative policy to tackling the terrorism in Indonesia and also fight the international terrorism, that can be in Indonesia too. The research method that used in this thesis throught research of normative law and the data type that used is secondary data using primary and secondary material law. The Criminal Law that using to tackling terrorism likely in Law Number 15 Year 2003, made criminalization. The criminalization is formulated in 2 (two) terrorism groups, that consist of Terrorism Crime and Crime Relating Terrorism Crime. But in the application, the Act Number 15 Year 2003 still found the problems in enforcement and must be addition of a new crime formulation and some section changes in the future.

Keywords : Terrorism, Criminalization, The Act Number 15 Year 2003



Supervising Material
Prof.Drs.Koesparmono Irsan,SH,MH,MBA
Technical Supervisor
KG Widjaya,SH,MH

DAFTAR ISI

	HALAMAN
Halaman Sampul.....	i
Lembar Persetujuan Tesis.....	ii
Pernyataan Keaslian Tesis.....	iii
Lembar Pengesahan Tesis.....	iv
Motto.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak.....	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel.....	xiii
Daftar Lampiran.....	xiv
 I. PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah/Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
D. Kerangka Teori, Konsepsional, Pemikiran.....	16
E. Metode Penelitian.....	19
F. Sistematika Penulisan.....	21
 II. TINJAUAN PUSTAKA.....	 23
A. Kebijakan Kriminal (<i>Criminal Policy</i>).....	23
B. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.....	30
C. Aspek bidang ketahanan nasional di dalam kehidupan nasional.....	35

1. Aspek Trigatra yang merupakan aspek alamiah..... ..	35
1.1. Posisi dan lokasi geografis Negara.....	35
1.2. Keadaan dan sumber-sumber kekayaan alam.....	36
1.3. Keadaan dan kemampuan penduduk.....	37
2. Aspek Pancagatra yang merupakan aspek sosial kemasyarakatan atau Ipoleksusbud hankam ..	38
2.1. Ketahanan nasional di bidang ideology..... ..	38
2.2. Ketahanan di bidang politik..... ..	39
2.3. Ketahanan di bidang ekonomi..... ..	39
2.4. Ketahanan di bidang sosial budaya..... ..	40
2.5. Ketahanan di bidang pertahanan keamanan..... ..	41
3. Aspek Astagatra atau Antargatra merupakan gabungan dari aspek Trigatra dan Pancagatra Ipoleksusbud Hankam dimana antara keduanya terdapat hubungan yang bersifat timbal balik dengan hubungan yang erat atau korelasi yang saling ketergantungan atau interdependensi..... ..	41
3.1. Hubungan Antargatra di dalam Trigatra..... ..	42
3.2. Hubungan Antagatra di dalam Pancagatra..... ..	42
3.3 Hubungan antara Trigatra dan Pancagatra..... ..	43
D. Sekilas Tentang Terorisme.....	43
1. Apa Itu Terorisme..... ..	43
2. Tindak Pidana Terorisme..... ..	52
3. Aksi Terorisme Di Indonesia..... ..	54
4. Faktor Penyebab Terorisme..... ..	55
5. Sejarah Terorisme..... ..	59
6. Motif Dilakukannya Terorisme..... ..	61
7. Aksi dan Dampak Terorisme..... ..	65

8. Ruang Lingkup Pengaturan Terorisme.....	67
9. Kebijakan Pidana dan Pemidanaan.....	70
E. Sekilas Tentang Densus 88 Anti Teror Polri.....	74
1. Pembentukan satuan elite Polri.....	74
2. Sejarah pembentukan detasemen khusus 88.....	74
3. Sekilas tentang jejak Densus 88 AT Polri.....	79
 III. HASIL PENELITIAN	
A. Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme.....	86
1. Terorisme di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.....	93
2. Terorisme di Indonesia dan Pengaturannya dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003.....	96
B. Efektifitas Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme.....	99
 IV. PEMBAHASAN	
A. Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme.....	105
B. Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme.....	107
1. Pengertian Kebijakan / Politik Kriminal.....	107
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Terorisme.....	109
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana yang berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme.....	168
4. Pidana dan Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Terorisme.....	172
5. Beberapa pengertian tentang hukum pidana.....	183

5.1 Hakikat Kejahatan.....	183
5.2 Pengertian Hukum Pidana.....	184
5.3 Hakikat Penegakan Hukum.....	185
5.4 Terorisme, Teroris, Terror dan Hak Asasi Manusia....	185
5.5 Pelaksanaan Hukum (Hukum sebagai suatu proses).. 5.6 Fungsi dan Peranan Polri.....	187 189
6. Penerapan Hukum Kepolisian Dalam Melaksanakan Kebijakan Hukum Pidana (Penal).....	190
6.1. Tindak Pidana.....	193
6.2. Subjek Tindak Pidana.....	197
7. Penerapan Hukum Kepolisian Dalam Melaksanakan Kebijakan Di Luar Hukum Pidana (Kebijakan Non Penal).....	202
C. Efektivitas Kebijakan Kriminal Dalam Menggulangi Tindak Pidana Terorisme.....	207
V. PENUTUP	
KESIMPULAN.....	212
SARAN	215

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

DAFTAR TABEL

1. Catatan rangkaian peristiwa serangan terorisme di Indonesia Tahun 1999-2009.....	7
2. Data korban anggota Polri dari peristiwa Bom terorisme..	70
3. Beberapa kasus bom yang menonjol di Indonesia.....	87

